

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2015**

NO	JUDUL RUU	DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
5	RUU tentang Pertanahan	DPR
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR
8	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR

10	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
11	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
12	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
13	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
14	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
15	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR
16	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
17	RUU tentang Arsitek	DPR
18	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
19	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR
20	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
21	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
22	RUU tentang Pertembakauan	DPR

23	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
24	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
26	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
27	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
29	RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
30	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
31	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR

33	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
34	RUU tentang Penjaminan	DPR
35	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
37	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH